

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN REVISI	v
SURAT PERNYATAAN ORISILANITAS	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Skripsi.....	21

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN	
PERATURAN KEBIJAKAN	22
A. Konsep Pemerintah.....	22
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	22
2. Otonomi Daerah di Indonesia	27
3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	34
B. Wewenang Pemerintah.....	43
1. Pengertian Wewenang	43
2. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintah	48
3. Sumber-Sumber Wewenang Pemerintah	51
4. Wewenang Pemerintah Daerah.....	55
5. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah.....	60
C. Peraturan Kebijakan	62
1. Pengertian Peraturan Kebijakan.....	62
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Kebijakan.....	64
D. Instrumen Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	66
1. Peraturan Daerah.....	67
2. Peraturan Kepala Daerah	69
3. Keputusan Pemerintah Daerah.....	72
4. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan	74
E. Tinjauan Islam Dalam Pemerintah Daerah	77

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SURAT EDARAN NOMOR: SE.1./MENLHK-PSLB3/2016 HARI PEDULI SAMPAH 2016	80
A. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Harga Plastik Berbayar...	80
B. Kekuatan Mengikatnya Surat Edaran No: SE.1./menlhk-PSLB3/2016 Tentang Hari Peduli Sampah 2016	87
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1: Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut UUNo. 12 Tahun 2011	15
Tabel 2: Prosentase Sampah di DIY Pada Tahun 2015	88